

ANALISIS *STAKEHOLDER* PROGRAM PENANAMAN DAN PEMANFAATAN BALSA DI RPH PANDANTOYO, BKPH PARE, KPH KEDIRI

Stakeholder Analysis on Planting and Utilization of Balsa in RPH Pandantoyo, BKPH Pare, KPH Kediri

Moh Rizal Pratama¹ dan Handian Purwawangsa^{2*}

(Diterima 6 Juni 2024 /Disetujui 15 Juli 2024)

ABSTRACT

Balsa planting in RPH Pandantoyo has benefits in economic, ecological, and social aspects. The objectives of this study were to identify stakeholders involved in balsa planting and utilisation activities, classify stakeholders based on their influence and importance on balsa planting and utilisation activities, and formulate a mechanism for relationships between stakeholders related to balsa planting and utilisation activities. Data collection was carried out using interviews and observations of stakeholders involved in the activities. The balsa planting programme involves Perhutani, LMDH Lancar Jaya, PT Bina Megah Indowood, and the village government. Based on the results of the assessment using the matrix of influence and importance, Perhutani, LMDH Lancar Jaya, PT Bina Megah Indowood are included in the key player category, and the village government is included in the crowd category.

Keywords: Collaboration, planting and utilization balsa, stakeholder

ABSTRAK

Penanaman balsa di RPH Pandantoyo memiliki manfaat di aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa, mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terhadap kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa, dan merumuskan mekanisme hubungan antar *stakeholder* terkait kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa. Program penanaman dan pemanfaatan balsa melibatkan Perhutani, LMDH Lancar Jaya, PT. Bina Megah Indowood, dan Pemerintah desa. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan matriks tingkat pengaruh dan kepentingan di dapatkan Perhutani, LMDH Lancar Jaya, PT. Bina Megah Indowood termasuk ke dalam kategori *key player*, dan Pemerintah desa termasuk ke dalam kategori *crowd*.

Kata kunci: Kolaborasi, penanaman dan pemanfaatan balsa, *stakeholder*

¹ Mahasiswa Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University
Jl. Ulin Kampus IPB, Dramaga, Bogor Jawa Barat, Indonesia 16680

² Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University
Jl. Ulin Kampus IPB, Dramaga, Bogor Jawa Barat, Indonesia 16680

* Penulis korespondensi:
email: handie79@apps.ipb.ac.id

PENDAHULUAN

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri adalah salah satu unit manajemen pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. RPH Pandantoyo yang terletak di BKPH Pare, KPH Kediri memiliki luas hutan produksi seluas 970 ha, salah satu jenis tanaman kayu yang diproduksi adalah balsa. RPH Pandantoyo memiliki kondisi ketinggian berada di 381 mdpl, jenis tanah regosol, tipe iklim C (subtropis), curah hujan 2.000 – 2.200 mm/tahun dengan karakteristik tersebut cocok untuk ditanam balsa, dan menurut hasil uji coba tanam balsa di Pandantoyo menunjukkan kemampuan untuk tumbuh cepat dan memiliki prospek pasar yang bagus (Puslitbang 2017).

Praktik penanaman dan pemanfaatan balsa di RPH Pandantoyo melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya perusahaan swasta, LMDH, dan pemerintah desa. Perhutani sebagai instansi yang diberi amanat untuk mengelola lahan kawasan hutan negara tentu tidak akan bisa melakukannya tanpa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar hutan dan pihak lain. Masyarakat sekitar hutan sebagai *stakeholder* yang sudah lama hidup dan mengantungkan hidupnya dengan hutan tentu memiliki pengetahuan lokal tentang bagaimana memanfaatkan fungsi hutan namun tetap lestari. Pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap hutan bisa menjadi pendorong perekonomian masyarakat sekitar dan ikut serta menjaga kelestarian hutan, tentu dalam keikutsertaannya harus bekerja sama dengan Perhutani dan masyarakat yang sudah lebih dulu ada dan memanfaatkan hutan.

Menurut Suproharjo (2005) pengelolaan sumberdaya yang demokratis melibatkan berbagai macam *stakeholder* yang memiliki pengaruh besar maupun kecil sehingga terbentuk suatu jembatan yang akan menghubungkan antar *stakeholder* terkait untuk mengelola sesuatu secara bersamaan. Partisipasi semua *stakeholder* diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan. Maka dari itu diperlukan analisis *stakeholder* untuk mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan setiap *stakeholder* yang terlibat kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa, sehingga nantinya dapat diketahui hubungan antar *stakeholder* yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 di wilayah kerja RPH Pandantoyo, BKPH Pare, KPH Kediri yang terlibat dalam perjanjian kerja sama penanaman dan pemanfaatan tanaman balsa antara Perhutani dengan PT. Bina Megah Indowood (BMI).

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, alat tulis, kamera, alat perekam suara, laptop, dan pendukung penelitian

lainnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa. Sedangkan, data sekunder di dapatkan dari studi literatur dan penelusuran dokumen terkait perjanjian kerjasama.

Prosedur Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan orang yang mengetahui kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Wawancara terhadap *stakeholder* yang berkepentingan terhadap kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa menggunakan metode *snowball sampling*. Berikut adalah jenis dan metode pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian yang tercantum pada Tabel 1.

Menurut Sugiyono 2016, wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *indepth interview*, dan dalam praktiknya metode wawancara semi terstruktur lebih fleksibel dibandingkan metode wawancara terstruktur. Penentuan narasumber didasarkan pada metode *snowball sampling*, peneliti bergerak dari informasi narasumber awal ke narasumber lainnya. Narasumber yang dimaksud adalah pimpinan dari masing-masing instansi *stakeholder* meliputi kepala dinas, ketua organisasi, perangkat desa, atau orang-orang yang ditunjuk oleh para pimpinan untuk mewakili *stakeholder* yang bersangkutan. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan dan daftar penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder*. Dalam teknik *purposive sampling* pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil unit yang penting dan representatif, sehingga tidak ada batasan jumlah informan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan intensitas sampling. Contoh dalam penelitian ini adalah ketika mencari informasi tentang kepentingan *stakeholder* pertimbangan yang digunakan adalah ketika informasi yang didapatkan sudah cukup

Tabel 1 Jenis dan metode pengumpulan data

Jenis data	Tujuan Penelitian	Metode Pengambilan Data	Variabel yang Diukur
Data Primer	Mengidentifikasi peran <i>stakeholder</i> berdasarkan pengaruh dan kepentingannya	Wawancara, observasi lapang, dan studi pustaka	Identitas <i>Stakeholder</i>
Data Primer	Mengklasifikasi <i>stakeholder</i> berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya	Pedoman wawancara dan wawancara	Klasifikasi tingkat pengaruh dan kepentingan <i>stakeholder</i>
Data Primer	Merumuskan mekanisme hubungan antar <i>stakeholder</i>	Hasil pengolahan data	Hubungan antar <i>stakeholder</i>

untuk digunakan dalam melakukan analisis *stakeholder* pada sistem penanaman dan pemanfaatan balsa, maka pengambilan informan harus dihentikan.

Analisis Data

Analisis data primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi lapang. Analisis metode kuantitatif dilakukan terhadap data primer yang diolah dalam bentuk tabel frekuensi dan matriks penilaian. Analisis metode kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diukur dan fakta yang muncul dari analisis kuantitatif terhadap data. Metode analisis *stakeholder* yang digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh Reed *et al.* (2009) dengan mencakup tiga tahapan yaitu identifikasi *stakeholder*, klasifikasi *stakeholder*, dan identifikasi hubungan antar *stakeholder*.

Pengaruh didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh *stakeholder*, sedangkan kepentingan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dari *stakeholder*. Model analisis *stakeholder* yang digunakan ialah model analisis yang diperkenalkan oleh Reed *et al.* (2009). Berikut merupakan tabel pengaruh dan kepentingan *stakeholder* (Tabel 2).

Dasar penyusunan matriks menggunakan informasi hasil wawancara yang diubah menjadi data nilai skoring yang kemudian dikelompokkan menurut klasifikasi *stakeholder* tersebut. Pengukuran tingkat pengaruh merujuk pada kekuatan yang dimiliki *stakeholder* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan, dengan menggunakan instrumen - instrumen kekuatan meliputi kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan, kelayakan kompensasi, kekuatan kepribadian dan kekuatan organisasi. Sedangkan kepentingan merujuk pada kebutuhan *stakeholder* di dalam pencapaian *output* dan tujuan (Reed *et al.* 2009).

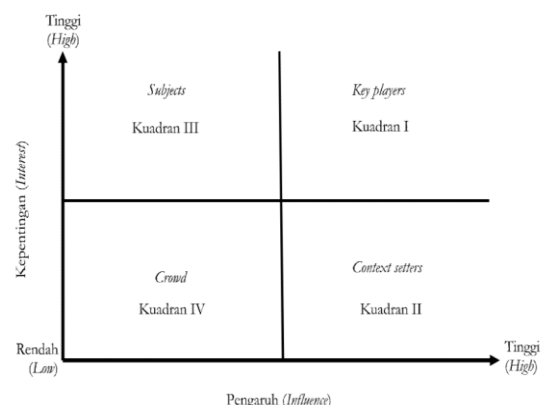
Pengukuran tingkat kepentingan meliputi keterlibatan, manfaat yang diperoleh, dan bentuk kewenangan/peran yang dimiliki. Penggunaan indikator tingkat pengaruh dan kepentingan dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan penelitian. Indikator

pengaruh dan kepentingan masing-masing mempunyai nilai rentang 0 – 5 dengan jumlah nilai skor untuk pengaruh 20 poin dan kepentingan 14 poin (Tabel 3). Dari hasil nilai skor kemudian dikelompokkan (*key player, subject, context setter, dan crowd*). Penempatan *stakeholder* ke dalam instrument yang digunakan kemudian disandingkan hingga membentuk koordinat. Hasil pengelompokan kemudian diklasifikasikan menurut matriks kriteria pengaruh dan kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil evaluasi potensi sumberdaya hutan tahun 2014, komposisi kawasan hutan di KPH Kediri terdiri dari Hutan Lindung seluas 37.927 ha dan Hutan Produksi seluas 79.404 ha. Kawasan hutan KPH Kediri memiliki 7 bagian hutan dengan kelas perusahaan Jati (16%), Pinus (76%), dan Sengon (8%). RPH Pandantoyo memiliki luasan 1.925,6 ha dan terletak di kecamatan Ngancar kabupaten Kediri yang meliputi 6 desa yaitu, Ngancar, Pandantoyo, Babadan, Sugiharwas, Sempu dan Manggis.



Sumber (Source): Eden & Ackermann (1998).

Gambar 1 Matriks pengaruh dan kepentingan

Tabel 2 Kriteria penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan

Pengaruh Stakeholder			
Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
5	18 - 20	Sangat Tinggi	Berpengaruh nyata terhadap aktivitas <i>stakeholder</i> lain
4	15 - 17	Tinggi	Berpengaruh besar terhadap aktivitas <i>stakeholder</i> lain
3	10 - 14	Cukup Tinggi	Cukup berpengaruh terhadap aktivitas <i>stakeholder</i> lain
2	5 - 9	Kurang Tinggi	Kurang berpengaruh terhadap aktivitas <i>stakeholder</i> lain
1	0 - 4	Rendah	Tidak berpengaruh terhadap aktivitas <i>stakeholder</i> lain
Kepentingan Stakeholder			
Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
5	13 - 14	Sangat Tinggi	Sangat memiliki kepentingan terhadap kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa
4	10 - 12	Tinggi	Berkepentingan besar terhadap kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa
3	7 - 9	Cukup Tinggi	Cukup memiliki kepentingan terhadap kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa
2	4 - 6	Kurang Tinggi	Kurang memiliki kepentingan terhadap kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa
1	0 - 3	Rendah	Tidak memiliki kepentingan terhadap kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa

Menurut data Puslitbang Perhutani 2015, sengon di RPH Pandantoyo memiliki intensitas serangan hama yang tinggi yaitu, uret, karat furu, boktor dan benalu dengan persentase kehilangan tebang dapat mencapai 12% hingga 74%. Untuk mengatasi hal tersebut KPH Kediri melakukan penanaman dan pemanfaatan balsa guna memutus rantai hama dan penyakit serta memperbaiki kualitas tanah. Balsa dinilai mampu tumbuh cepat dan belum ada gejala serangan hama dan penyakit. Pada tahun 2021 Perhutani melakukan kerjasama dengan PT. Bina Megah Indowood (BMI) untuk kegiatan penanaman hingga pemasaran komoditas balsa dengan luasan 49,40 ha. Perjanjian kerja sama penanaman dan pemanfaatan balsa selain melibatkan Perhutani dengan PT. Bina Megah Indowood (BMI) juga melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lancar Jaya yang terletak di desa Ngancar. RPH Pandantoyo dipilih dalam kerjasama ini karena berdasarkan hasil uji *density* yang dilakukan PT. Bina Megah Indowood (BMI), RPH Pandantoyo relatif memenuhi nilai *density* yang diinginkan dengan rata-rata 175 kg/m³ dari target nilai yang diinginkan yaitu 150 – 176 kg/m³. Selain itu, RPH Pandantoyo juga sudah berpengalaman menjalankan kerja sama dengan investor sejenis yaitu PT. Kutai Timber Indonesia pada tahun 2016 hingga 2021.

Identifikasi Stakeholder

Dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa, identifikasi *stakeholder* menjadi hal penting dalam analisis *stakeholder*. Identifikasi dilakukan dengan observasi lapang, penelusuran dokumen terkait, dan rekomendasi dari *stakeholder* KPH Kediri. Hasil identifikasi didapatkan 4 *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa yaitu Perhutani, LMDH Lancar Jaya, PT. Bina Megah

Indowood, dan Pemerintah Desa. Daftar *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa dapat dilihat pada Tabel 4.

Perhutani menjadi *stakeholder* yang memiliki keterlibatan yang sangat besar dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa. RPH Pandantoyo yang menjadi bagian wilayah kerja dari BKPH Pare menjadi salah satu RPH yang memiliki kemampuan pengelolaan kerja sama yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan BKPH Pare sering melakukan sosialisasi maupun penggunaan teknologi digital. Para pegawai Perhutani menyampaikan bahwa memiliki persoalan tentang keterbatasan dan lemahnya kompetensi SDM dalam melakukan pendampingan. Personel pada level mandor dan mantri melihat bahwa proses pendampingan LMDH bukan tugas utama yang diperankan, namun mereka menyadari bahwa dalam mengelola dan melakukan keamanan membutuhkan bantuan dari masyarakat. Sementara, mandor atau mantri adalah personel terdekat di tingkat tapak dengan mobilitasnya mampu menjangkau mitra atau LMDH dalam keseharian menjalankan tugas.

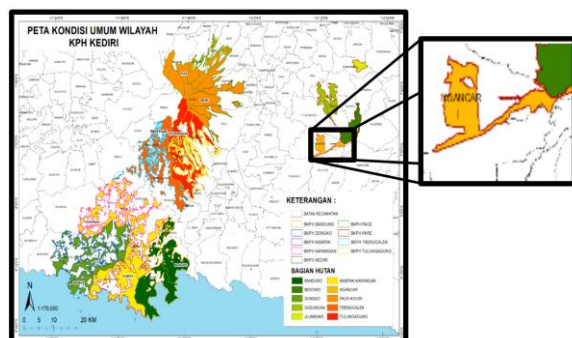
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menjadi perkumpulan para petani yang menggarap lahan di Perhutani. Menurut Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

Pemerintah desa turut berperan dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa karena masyarakat yang terlibat termasuk dalam wilayah administrasi pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi dan motivasi dibidang ekonomi, lingkungan hidup, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya (Permendagri 2015).

PT. Bina Megah Indowood (BMI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *wood manufacture* dengan produk utama berupa *wood flooring* dan *wood decking* dengan pabrik utama berlokasi di Gresik, Jawa Timur. PT. Bina Megah Indowood berperan dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa sebagai investor yang akan membeli kayu hasil kerjasama dengan Perhutani. Selain itu, PT. Bina Megah Indowood juga memiliki misi untuk melakukan pemberdayaan

Tabel 3 Klasifikasi *stakeholder* menurut nilai pengaruh dan kepentingan

No	Nilai Pengaruh	Nilai Kepentingan	Keterangan
1	11 - 20	8 - 14	Key Player
2	0 - 10	8 - 14	Subject
3	11 - 20	0 - 7	Context Setter
4	0 - 10	0 - 7	Crowd



Gambar 2 Peta kondisi umum wilayah KPH Kediri

Tabel 4 *Stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa

No	Stakeholder
1	Perhutani
2	LMDH Lancar Jaya
3	PT. Bina Megah Indowood
4	Pemerintah Desa

masyarakat melalui kepastian pasar, lapangan kerja, dan memanfaatkan lahan hutan untuk tumpang sari palawija. Daftar aktor, tingkat kepentingan, dan perilaku dijelaskan pada Tabel 5.

Analisis Pengaruh dan Kepentingan

Hasil skoring tingkat pengaruh dan kepentingan yang dilakukan setiap *stakeholder* dapat dilihat pada Tabel 6, yang kemudian diklasifikasikan sesuai matriks pengaruh dan kepentingan seperti pada Gambar 3.

Stakeholder yang termasuk kelompok *key player* dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa dijelaskan sebagai berikut:

1. Perhutani

Perhutani merupakan lembaga atau instansi yang memiliki nilai pengaruh dan kepentingan yang tinggi, karena memiliki peran secara langsung dalam mengoordinir, menjaga dalam perlindungan, dan memastikan kelestarian hutan. Selain itu, memiliki kepentingan ekonomi berupa bagi hasil penjualan kayu balsa.

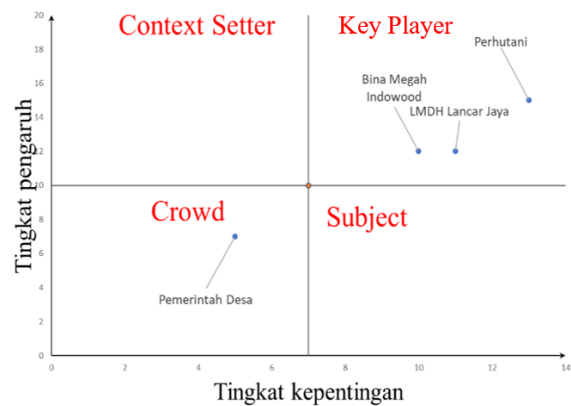
2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan mitra Perhutani yang memiliki nilai pengaruh dan kepentingan sama-sama tinggi. LMDH memiliki keterlibatan dalam memanfaatkan lahan kehutanan untuk tanaman tumpang sari sebagai sumber pendapatan, menjaga tegakan sesuai dengan

perjanjian kerjasama sehingga memiliki peran dalam melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. PT. Bina Megah Indowood (BMI).

PT. BMI menjadi salah satu *stakeholder* yang juga termasuk ke dalam *key player*. PT. BMI memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang cukup tinggi dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa. PT. BMI bertindak sebagai investor yang membiayai kegiatan persiapan tanaman, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan. Selain itu, memiliki kepentingan sebagai pemenuhan kebutuhan bahan



Gambar 3 Matriks tingkat pengaruh dan kepentingan

Tabel 5 Aktor, tingkat kepentingan, dan perilaku *stakeholder*

Aktor	Tingkat Kepentingan	Tingkat Pengaruh	Kepentingan	Perilaku Aktor
Key player				
Perhutani	Sangat Berkepentingan	Berpengaruh Tinggi	Menjaga kelestarian hutan, menjalankan kewajiban untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, pendapatan melalui bagi hasil kegiatan penjualan kayu.	Memberikan akses pemanfaatan lahan sistem penanaman dan pemanfaatan balsa, fasilitator pelatihan atau sosialisasi kegiatan Perhutani, penyusunan PKS, membuka akses investor.
LMDH Lancar Jaya	Berkepentingan Tinggi	Cukup Berpengaruh	Keberadaan lembaga, akses sumber penerimaan pendapatan melalui bagi hasil kegiatan penjualan kayu, pemanfaatan lahan dibawah tegakan.	Membantu kegiatan bisnis Perhutani dan Investor, menjaga tegakan dengan tetap memanfaatkan lahan dibawah tegakan dengan tumpang sari.
PT. Bina Megah Indowood	Berkepentingan Tinggi	Cukup Berpengaruh	Pemenuhan kebutuhan industri bahan baku perusahaan, menjalankan misi pemberdayaan masyarakat melalui kepastian pasar, dan pemanfaatan lahan dibawah tegakan.	Melakukan komunikasi dan koordinasi serta monitoring antara Perhutani dan LMDH, Menanggung biaya penanaman, pemeliharaan hingga akhir daur.
Crowd				
Pemerintah Desa	Kurang Berkepentingan	Kurang Berpengaruh	Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, pembangunan daerah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.	Bantuan fasilitasi bersama dengan Perhutani dan LMDH, membantu komunikasi dan administrasi LMDH.

Tabel 6 Hasil skoring tingkat pengaruh dan kepentingan

No.	Aktor	Nilai Pengaruh	Nilai Kepentingan	Keterangan
1	Perhutani	15	13	Key Player
2	LMDH Lancar Jaya	12	11	Key Player
3	PT. Bina Megah Indowood	12	9	Key Player
4	Pemerintah Desa	7	5	Crowd

baku industri mereka. Pengaruh PT. BMI cukup kuat karena setiap minggu selalu melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan di setiap petak dengan langsung terjun ke lahan, sehingga interaksi PT. BMI dengan *stakeholder* lainnya terbilang cukup sering.

Berdasarkan hasil penelitian untuk kategori *context setter* dan *subject* tidak ditemukan keberadaan *stakeholder* karena setiap *stakeholder* memiliki pengaruh dan kepentingan yang telah diatur serta dirumuskan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Sedangkan, dalam kategori *crowd* ditemukan keberadaan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemerintah desa hanya sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi ataupun rapat. LMDH yang secara administratif pemerintah termasuk kedalam masyarakat desa membuat kegiatan yang dilaksanakan tidak lepas komunikasi dengan pemerintah desa. Pemerintah desa tidak memiliki keterlibatan secara langsung dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa karena pada dasarnya Perhutani langsung berkoordinasi dengan LMDH dan PT. BMI kemudian memberikan informasi berupa undangan untuk dapat ikut serta mendukung kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa.

Interaksi Antar Stakeholder

Interaksi antar *stakeholder* dan kerjasama yang terjadi dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. Perhutani dengan LMDH Lancar Jaya

Dalam kegiatan kerjasama penanaman dan pemanfaatan balsa ini, antara Perhutani dan LMDH memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga tanaman kehutanan, dan diperkenankan untuk melakukan tumpang sari ketika tanaman telah berusia 2 tahun. Perhutani tidak menetapkan jenis komoditas yang boleh dan tidak boleh ditanam oleh masyarakat secara spesifik. Sehingga masyarakat memilih untuk melakukan usahatani pada empat komoditas yaitu nanas, jagung, tomat dan cabai karena keempat komoditas tersebut sesuai dengan kondisi tanah di Desa Ngancar. Kegiatan penanaman, persiapan lahan, pemeliharaan hingga pengamanan dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan pengamanan yang dilakukan terbagi menjadi dua penjagaan. Pertama adalah pengamanan pada tanaman balsa yang dilakukan setiap harinya oleh pihak Perhutani dengan masyarakat. Kedua adalah pengamanan pada saat tebang. Tindakan pelanggaran yang ditemukan pada kegiatan patroli akan diamankan ke kantor RPH Pandantoyo kemudian diberikan peringatan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh kepala RPH Pandantoyo. Kegiatan perambahan yang biasanya terjadi adalah perambahan daun balsa yang digunakan untuk pakan ternak oleh beberapa oknum masyarakat, jika terjadi hal tersebut maka anggota LMDH akan menindak dan mengingatkan terlebih dahulu, jika masih terulang maka mekanisme sanksi akan diserahkan ke RPH Pandantoyo dengan membuat surat pernyataan.

2. Perhutani dengan PT. Bina Megah Indowood

Hubungan yang terjadi antara Perhutani dengan PT. BMI adalah kerjasama dalam memastikan ketersediaan

pasar kayu Perhutani dan pasokan bahan baku industri PT. BMI. Sebelum dengan PT. BMI, Perhutani pernah menjalin kerjasama dengan PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) dengan luasan 200 ha pada tahun 2016 hingga 2021. Setelah perjanjian itu selesai, PT. BMI datang untuk menawarkan diri sebagai investor selanjutnya kepada Perhutani. PT. BMI datang dengan mekanisme kerjasama yang sama dengan PT. KTI hanya saja luasan yang PT. BMI inginkan hanya seluas 49,40 ha, karena ini adalah *pilot project* pertama PT. BMI dalam kegiatan kerjasama penanaman dan pemanfaatan balsa. Pengusulan kerjasama telah diajukan PT. BMI sejak 2021 namun baru bisa selesai 2022 karena banyaknya mekanisme administrasi yang harus dilalui, sehingga membuat proses pengajuan hingga selesai cenderung lama. Sedangkan, untuk penanaman baru dimulai pada bulan Maret 2023. Selama kerjasama terjalin, PT. BMI berkewajiban untuk membiayai kegiatan persiapan tanaman, penyediaan bibit balsa, pupuk, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hingga akhir daur. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Maret 2024, persentase tanaman yang hidup berkisar 70 – 80% dari target tanaman yang hidup 90 – 95%. Hasil ini terbilang sangat baik untuk menilai kepuasan kerjasama. Dalam hal pengamanan dan pengawasan perwakilan dari PT. BMI setiap seminggu sekali akan berkunjung ke petak yang didampingi oleh KRPH Pandantoyo, sehingga keakraban antar *stakeholder* sangat erat.

3. Perhutani dengan Pemerintah Desa

Hubungan yang terjadi antara Perhutani dengan Pemerintah Desa adalah dalam hal pengawasan dan fasilitasi. Keterlibatan pemerintah desa hanya menyediakan tempat dan sarana prasarana ketika dilakukan sosialisasi atau pemberdayaan masyarakat. Perhutani akan mengundang perwakilan dari pemerintah desa untuk hadir dan mengikuti kegiatan, sebagai wakil dari pemangku wilayah pemerintahan setempat.

4. LMDH Lancar Jaya dengan PT. Bina Megah Indowood

Hubungan kerjasama antara LMDH dengan PT. BMI terjadi dalam kegiatan pemanfaatan lahan tumpang sari, ketersediaan bibit balsa dan menjaga tanaman pokok. PT. BMI berkewajiban dalam membiayai kegiatan persiapan tanaman, penyediaan bibit balsa, pupuk, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hingga akhir daur. Dalam hal menyediakan bibit balsa, PT. BMI akan bekerjasama dengan LMDH untuk menyediakan bibit tersebut. PT. BMI kurang lebih membutuhkan sekitar 556 *polybag* dan LMDH menjual dengan harga Rp 2.500/*polybag*. Kegiatan kerjasama penyediaan bibit bertujuan agar LMDH memperoleh keuntungan juga dari jual beli bibit. Selain kegiatan penyediaan bibit, LMDH juga diberi kesempatan untuk melakukan tumpang sari dibawah tegakan tanaman pokok ketika berusia 2 tahun. Dalam perjanjian tidak diatur jenis tanaman pengisi apa yang harus ditanam LMDH, namun dalam praktiknya PT. BMI mengusulkan agar tidak menanam jagung, dan merekomendasikan nanas. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. BMI di lahan tanaman

jagung telah ditanam terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan tanaman pokoknya tidak bisa berkembang dengan baik dan didapatkan persentase kematian tanaman pokok hingga 60 – 70%.

5. LMDH Lancar Jaya dengan Pemerintah Desa

Hubungan LMDH dengan Pemerintah Desa terjadi dalam hal komunikasi dan koordinasi. Anggota LMDH yang masuk sebagai masyarakat desa membuat pemerintah desa berperan dalam melakukan fasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan. LMDH Lancar Jaya adalah salah satu LMDH yang termasuk ke dalam LMDH Mandiri, sehingga memiliki jadwal rapat rutin dan sosialisasi yang dalam praktiknya dilakukan di kantor sekretariat LMDH dan mengundang perwakilan pemerintah desa. Hubungan yang terjalin antara LMDH dan pemerintah desa juga cukup kuat karena Ketua LMDH Lancar Jaya merupakan kakak dari Kepala Desa yang sedang menjabat saat ini.

6. PT. Bina Megah Indowood dengan Pemerintah Desa

Hubungan PT BMI dengan Pemerintah Desa terjadi dalam hal komunikasi dan koordinasi. Kerjasama antara PT. BMI dengan pemerintah desa dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa tidak dilakukan secara langsung. Interaksi hanya terjadi ketika PT. BMI melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pada saat kegiatan tersebut PT. BMI mengundang perwakilan dari pemerintah desa untuk hadir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terdapat empat *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan balsa dan memiliki peran serta wewenang yang berbeda-beda. Secara garis besar setiap *stakeholder* memiliki peranan dalam menjaga nilai sosial, ekonomi, dan ekologi. Nilai ekonomi meliputi jual beli kayu balsa sebagai sumber pendapatan petani dan Perhutani, nilai sosial yang muncul adalah intensitas interaksi antar *stakeholder* dalam memanfaatkan lahan untuk peningkatan kesejahteraan, dan nilai ekologi yaitu menjaga ekosistem hutan, menekan erosi, meningkatkan biodiversitas, serta sebagai penyerap CO₂. Terdapat tiga *stakeholder* yang

termasuk kedalam kategori *key player* yaitu Perhutani, LMDH Lancar Jaya, dan PT. Bina Megah Indowood. Kategori lainnya adalah pemerintah yang masuk ke dalam kategori *crowd*, kategori *context setter* dan *subject* tidak ditemukan dalam hasil klasifikasi. Dan, mekanisme hubungan komunikasi dan kerjasama yang terjadi antar *stakeholder* tergolong baik karena dari Perhutani, LMDH, PT. BMI, dan Pemerintah Desa sudah mengerti tupoksi dan wewenang mereka masing-masing sesuai dengan Perjanjian Kerja sama yang telah disepakati. Perhutani, LMDH, dan PT. BMI memiliki hubungan dalam kerjasama penjualan kayu dan pemanfaatan lahan, sedangkan Pemerintah desa memiliki peran dalam fungsi koordinasi karena sebagai perwakilan dari pemerintah setempat.

Saran

Dalam pelaksanaan durasi kontrak kerjasama diperlukan evaluasi terutama dalam hal jangka waktu perjanjian kerjasama. Durasi kerja sama bisa disesuaikan dengan minimal umur daur tanaman yang ditanam dalam hal ini tanaman balsa maka dapat disesuaikan dengan daur tanaman balsa yaitu empat tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- [Kemendagri] Kementerian Dalam Negeri. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Jakarta: Kemendagri.
- [Puslitbang Perhutani] Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani. 2015. Wacana Puslitbang. 2015.
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris J, Prell CH, Quin CH, Stringer LC. 2009. Who's in and why? A typology of *stakeholder* analysis methods for natural resources management. *Journal of Environmental Management*. 90: 1933-1949. doi:10.1016/j.jenvman.2009.01.001.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.